



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO
TAHUN 2025

www.diskominfotik.wajokab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Aalamin. Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dapat terselesaikan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025.

Tim penyusun Renja ini telah bekerja mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dengan menggunakan pendekatan teknokratik, *top down – bottom up* dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo maupun berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo, dengan harapan dokumen ini dapat menjadi rujukan dalam penetapan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025.

Pada kesempatan ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras dan kinerja dalam penyusunannya. Insha Allah, Tuhan Yang Maha Esa membalasnya sebagai ibadah kepada-Nya. Terima kasih atas pengabdianya membangun Bumi Lamaddukelleng yang kita cintai, menuju kemajuan dan kesejahteraan di tanah Wajo.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sengkang, 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo,

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19740411 199303 1 002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 5
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 7
1.3.1. Maksud	I - 10
1.3.2. Tujuan	I - 10
1.4. Sistematika Penulisan	I - 11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II - 12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah...	II - 12
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 43
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 47
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 59
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III - 69
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 69
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III - 71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV - 73
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Terhadap SPM	IV - 73
4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Terhadap TPB/SDGs	IV - 75
4.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV - 76
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	V - 93
5.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	V - 93
5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi OPD Pengampu SPM	V - 95
5.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/ SDGs	V - 96



BAB VI	PENUTUP	VI - 99
	6.1. Kaidah Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	VI - 99
	6.2. Catatan Penting	VI -100
	6.3. Rencana Tindak Lanjut Renja Perangkat Daerah	VI -100



DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Wajo	II - 13
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kabupaten Wajo	II - 35
2.2.3.1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	II - 36
2.2.3.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi	II - 37
2.2.3.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	II - 37
2.2.3.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	II - 38
2.2.3.5 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	II - 38
2.2.3.6 Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	II - 39
2.2.3.7 Tersedianya Buku "Kabupaten Dalam Angka"	II - 39
2.2.3.8 Tersedianya Buku "PDRB"	II - 40
2.2.3.9 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	II - 40
2.2.3.10 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II - 41
2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	II - 44
2.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	II - 45
2.5. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025	II - 48
2.6. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	II - 59
2.7. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025	II - 59
2.8. Penggabungan Prioritas Masukan dari Masyarakat Tahun Dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	II - 60
3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi	III - 70
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III - 71
4.1. Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap SPM Tahun 2025	IV - 74
4.2. Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap TPB/SDGs Tahun 2025.....	IV - 75
4.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	IV - 81
5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo	V - 93



5.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo	V - 95
5.3.	Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo	V - 96
5.4.	Penetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025	V - 96



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. Bagan Alir Penyusunan Renja Perangkat Daerah	I - 4
1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran .	I - 4
2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	II - 29
2.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan	II - 30
2.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi	II - 31
2.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	II - 31
2.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	II - 32
2.5. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	II - 32
2.6. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	II - 33
2.7. Tersedianya Buku "Kabupaten Dalam Angka"	II - 33
2.8. Tersedianya Buku "PDRB"	II - 34
2.9. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi	II - 34

BAB

I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, digambarkan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah menyusun rencana kerja selanjutnya disingkat Renja dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 selanjutnya disingkat Renstra Diskominfotik Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagaimana amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah salah satunya adalah rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang



secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun guna mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sesuai Pasal 126 sampai dengan Pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilalui setelah adanya persiapan yang meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan; d. persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Hal ini dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, menyebutkan bahwa salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Wajo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Olehnya itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo berkewajiban menyusun Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menyusun dan menyampaikan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 paling lambat minggu 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati Wajo tentang RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 ditetapkan. Penyusunan rancangan akhir Renja dimaksud berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun berjalan. Tujuan dari berpedoman pada



Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 adalah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju. Begitupula dengan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026.

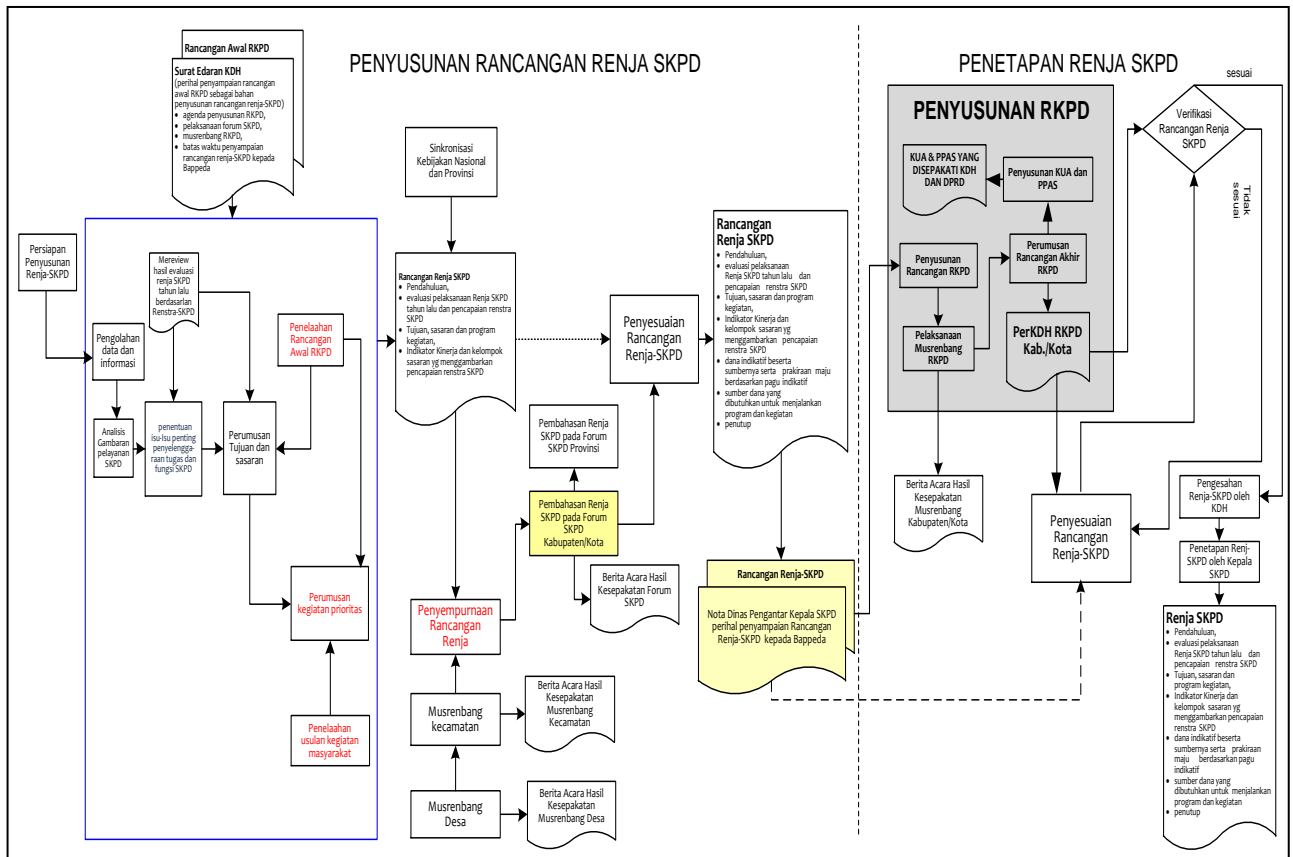
Rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan tahapan terakhir sebelum penetapan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, setelah tersusun dengan baik dokumen dimaksud, selanjutnya akan dirumuskan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, penyajian rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dan penetapan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025.

Dokumen rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis sebagai jembatan antara perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026. Kesemuanya itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 disusun secara terpadu, partisipatif dan teknokratis.

Dalam proses penyusunannya, Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 berkait erat dengan dokumen lainnya, dimana renja dimaksud disusun berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026. Begitu pula renstra tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, sedangkan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025. Nantinya rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 setelah melalui berbagai proses sampai dengan penetapannya, selanjutnya akan dijadikan

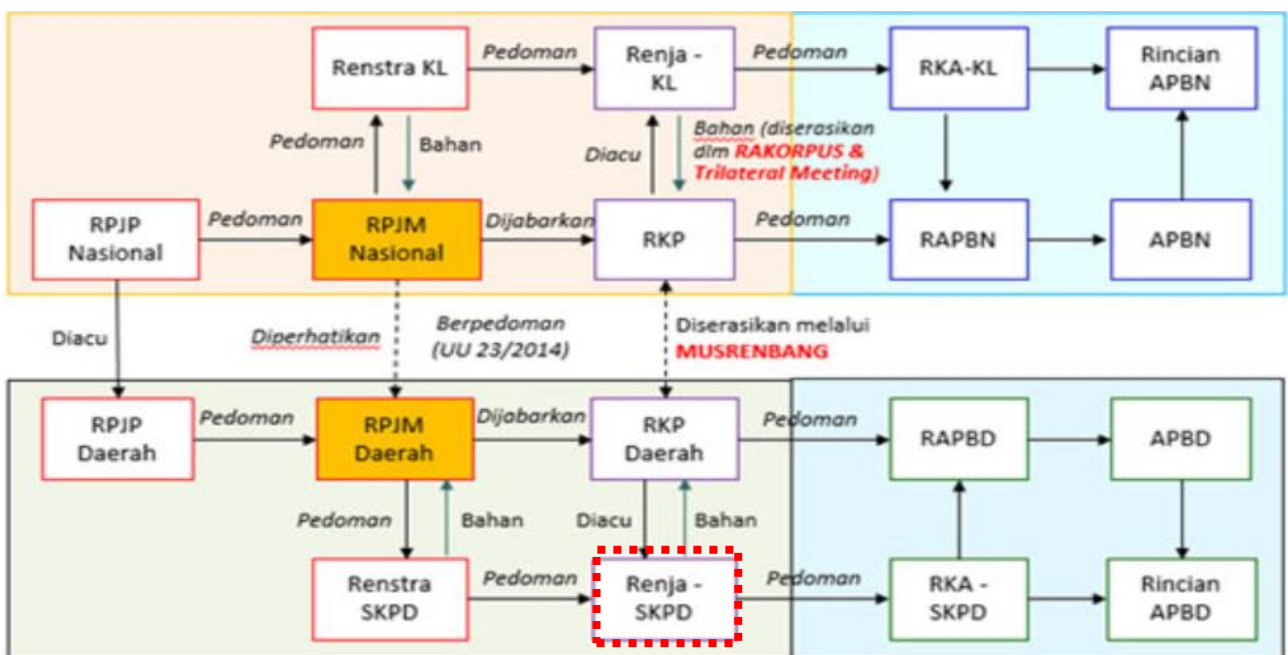
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dan selanjutnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo Tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya mengenai keseluruhan proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada bagan alir penyusunan Renja dan hubungan antar dokumen sebagai berikut:



Gambar 1.1.

Bagan Alir Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Gambar 1.2.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 283);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
47. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9),

50. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
53. Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025–2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 5);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan bahan masukan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 adalah:

1. Penjabaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 ke dalam rencana operasional tahunan;

2. Pedoman dan arah bagi aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025;
3. Sarana alat ukur penilaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
4. Pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan reviu terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional dan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target dan pagu anggaran.

BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan indikator kinerja perangkat daerah, indikator kinerja SPM bagi OPD pengampu SMP dan indikator TPB/SDGs.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan catatan penting serta rencana tindak lanjut Renja Perangkat Daerah.

BAB

II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pada bab evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, digambarkan mengenai evaluasi, analisis kinerja pelayanan, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Pelaksanaan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam rangka pengidentifikasian sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo memuat hasil evaluasi dari berbagai jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terkait dengan kewenangannya yang meliputi urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar berupa bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dan perkiraan pelaksanaan DPA-Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai keseluruhan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD
Sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Wajo

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Dengan Tahun 2025		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)	(12)
x	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-Rata realisasi kegiatan perangkat daerah	97,78%	100,00%	100,00 %	93,01%	93,01%	100,00%	95,34%	97,50%	
x	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
x	xx	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00 %	91,73%	91,73%	100,00%	97,24%	97,24%	
x	xx	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Dengan Tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)	(12)
x xx 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00 %	92,44%	92,44%	100,00%	97,48%	97,48%	
x xx 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	100,00%	100,00 %	96,56%	96,56%	100,00%	98,85%	98,85%	
x xx 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00 %	99,70%	99,70%	100,00%	99,90%	99,90%	
x xx 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00 %	96,76%	96,76%	100,00%	98,92%	98,92%	
x xx 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Dengan Tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)	(12)
2											
2	16										
2	16	02									
2	16	02	2.01								
2	16	03									
2	16	03	2.01								



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Dengan Tahun 2025		Catatan			
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)	(12)			
	daerah kabupaten / kota													
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah	55,00%	40,00%	45,00 %	98,16%	218,13%	50,00%	62,72%	114,04%	
2	20			STATISTIK										
2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	100,00%	100,00%	100,00%	93,51%	93,51%	100,00%	97,84%	97,84%	
2	20	02	2.01	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	100,00 %	93,51%	93,51%	100,00%	97,84%	97,84%	
2	21			PERSANDIAN										





Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra OPD s/d Dengan Tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)	(12)
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	20,92%	20,46%	20,62 %	97,67%	473,67%	20,70%	46,28%	221,21%	
2 21 02 2.01	<i>Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota</i>	<i>Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	60,00%	45,00%	50,00 %	96,50%	193,00%	55,00%	65,50%	109,17%	
2 21 02 2.02	<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</i>	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo. Dalam pelaksanaan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

2.2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati dalam menentukan kebijakan menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

- a. merumuskan program kerja kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dalam lingkup organisasi;
- b. mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- c. membina, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas di Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik,

- Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan agar berjalan optimal;
- d. merumuskan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
 - e. menyelenggarakan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
 - f. menyiapkan bahan dan atau menetapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
 - g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
 - h. mengevaluasi program kegiatan kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional dalam lingkup organisasi berdasarkan hasil kinerja dan sebagai bahan koreksi untuk peningkatan kinerja kedepan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.2.1.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
- c. pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional penyusunan program kesekretariatan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya agar pekerjaan berjalan lancar dan optimal;



- c. mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur;
- d. membimbing bawahan dalam menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kesekretariatan;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan pada lingkup kesekretariatan;
- g. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan supervisi kebijakan teknis bidang Kesekretariatan pada instansi terkait dalam rangka sinkronisasi, dan integrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- i. melakukan evaluasi dan analisis kegiatan sekretariat.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program dinas;
- f. mengkoordinasikan pengaturan administrasi surat-surat masuk dan keluar;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- i. menyelenggarakan rapat-rapat dinas dan keprotokoleran serta hubungan masyarakat;
- j. mengendalikan pelayanan pengarsipan kepegawaian;
- k. mengklasifikasi dan meneliti surat menurut jenisnya;
- l. mendistribusikan surat sesuai bidang/unit kerja yang menangani;
- m. melaksanakan penataan dan pengohanan data kearsipan kepegawaian secara daring/elektronik;
- n. melaksanakan administrasi perencanaan pengadaan, pendistribusian dan penghapusan barang;
- o. menyelenggarakan penginventarisasian barang;
- p. melaksanakan pengadministrasian perjalanan dinas pegawai;
- q. melaksanakan penyusunan formasi jabatan dan *bezetting* serta data pegawai;
- r. menghimpun dan mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian lingkup internal dan eksternal;
- s. menyelenggarakan urusan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai, absensi, dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai yang indisipliner;
- t. melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin belajar, karpeg, kartu askes, dan pembinaan karier pegawai;
- u. melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai;
- v. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan;
- w. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian;
- x. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- y. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- z. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- bb. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- cc. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- dd. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- ee. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- ff. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- gg. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2.1.2.2. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris mengumpulkan, mengklasifikasi dan merumuskan kebijakan teknis penyusunan program, penyajian data penyusunan laporan kinerja dan pelaporan realisasi program kegiatan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program dinas;
- f. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja SKPD);
- g. melaksanakan pengolahan sistem informasi rencana umum pengadaan;
- h. melaksanakan pengolahan sistem informasi monitoring dan evaluasi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja anggaran dan rencana kerja anggaran perubahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan ;
- k. melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah SKPD;
- l. melaksanakan dan merumuskan bahan pelaporan keterangan pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan dan merumuskan penyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- n. melaksanakan dan merumuskan bahan laporan triwulan dan tahunan;
- o. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- p. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.2.1.2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan,

melaksanakan, membagi tugas, mengelola dan mengontrol urusan administrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Keuangan;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian pengembangan karier;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
- f. meneliti dan menelaah kelengkapan surat permintaan pembayaran UP, GU, TU, LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa;
- g. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran;
- h. melaksanakan persiapan Surat Perintah Membayar sesuai dengan SPP yang diajukan;
- i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. menyelenggarakan pelaporan keuangan SKPD;
- k. melaksanakan penatausahaan dan akuntansi SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
- m. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.2.1.3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Hubungan Masyarakat dan komunikasi publik berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan layanan penyelenggaraan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan Humas, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2.1.4. Bidang Informatika dan Persandian

Bidang Informatika dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan layanan dan tata kelola *e-Government*, pengembangan aplikasi dan pengelolaan *data center*, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta jaringan teknologi informasi komunikasi terintegrasi pemerintah daerah, pengendalian penyelenggaraan jasa menara telekomunikasi dalam wilayah daerah, Layanan tata kelola, operasional, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang informatika dan persandian berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informatika dan persandian berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang informatika dan persandian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan bidang pengembangan aplikasi dan *e-government*, infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan *data center*, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi dan *e-government*, infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan *data center*, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2.1.5. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian,

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral, serta Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

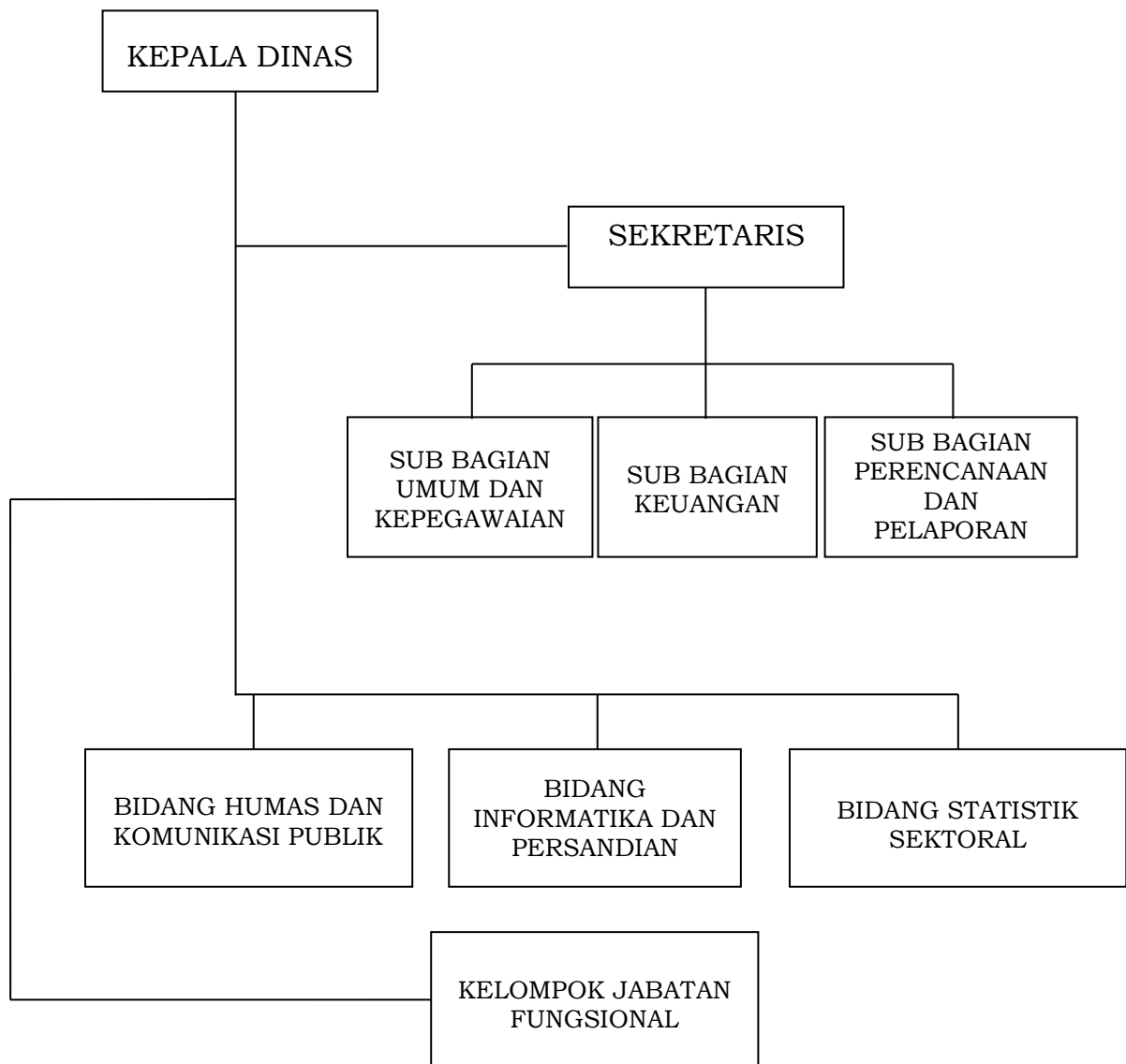
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Statistik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Statistik;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Statistik;
- d. pelaksanaan evaluasi, monitoring program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Statistik;

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang bidang informatika dan persandian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;

- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

Sumber: Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

2.2.2. Kinerja Pelayanan OPD

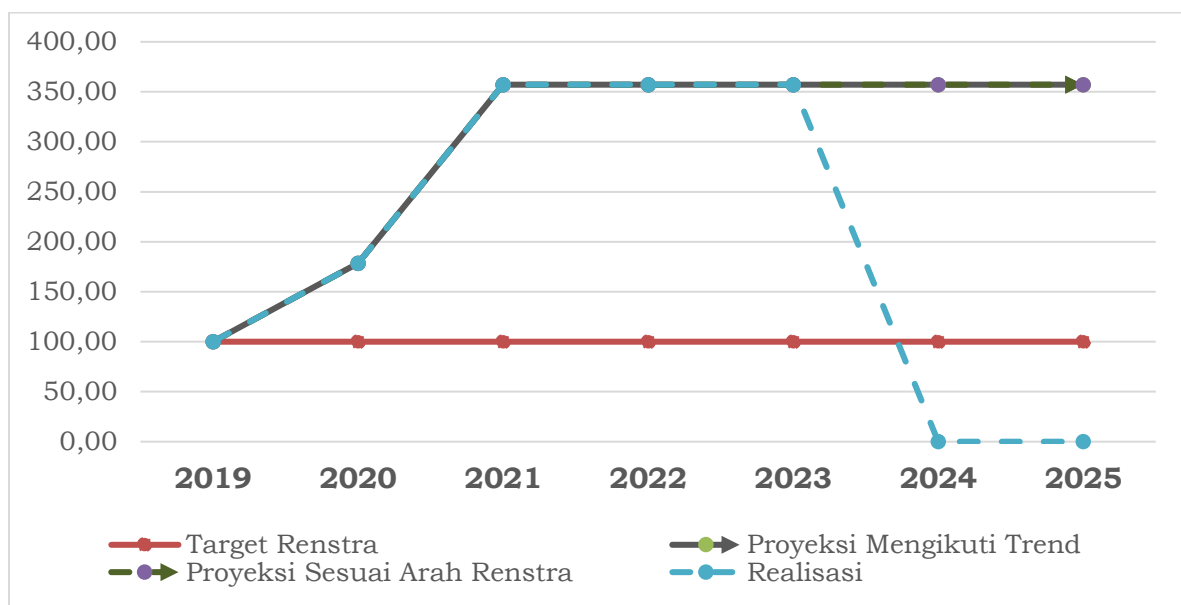
Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *reviuv* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi masing-masing indikator yang telah

ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi yang berasal dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan proyeksi kinerja pada 9 (sembilan) indikator kinerja pembangunan daerah dapat tersajikan sebagai berikut.

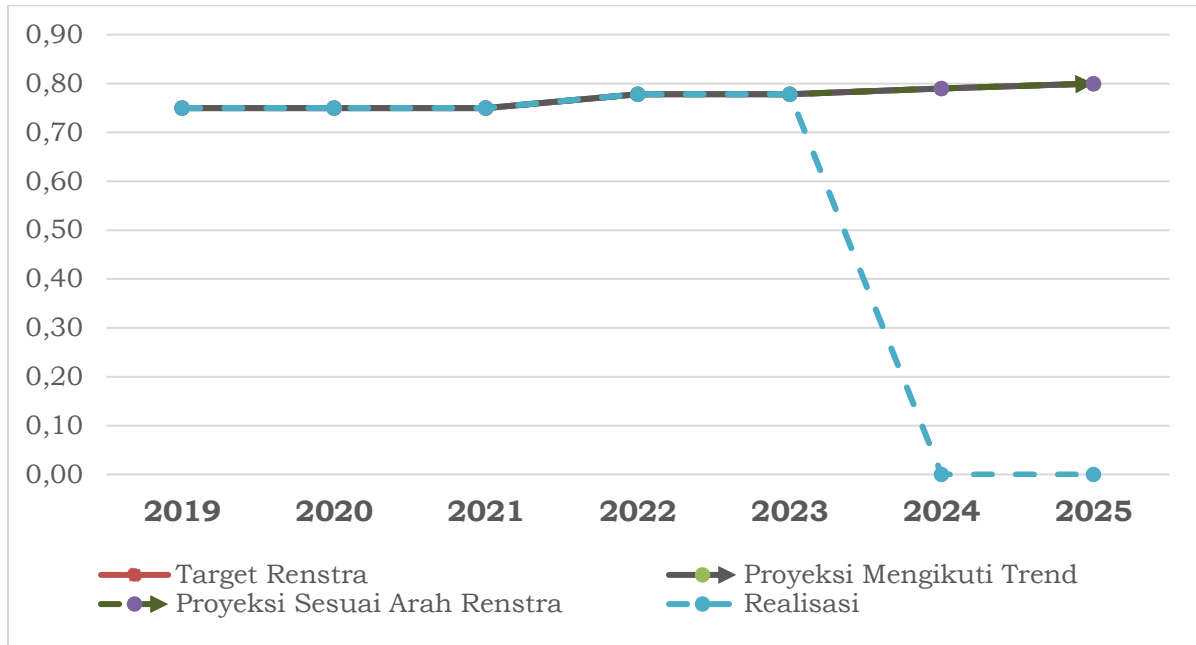
Gambar 2.1.

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan



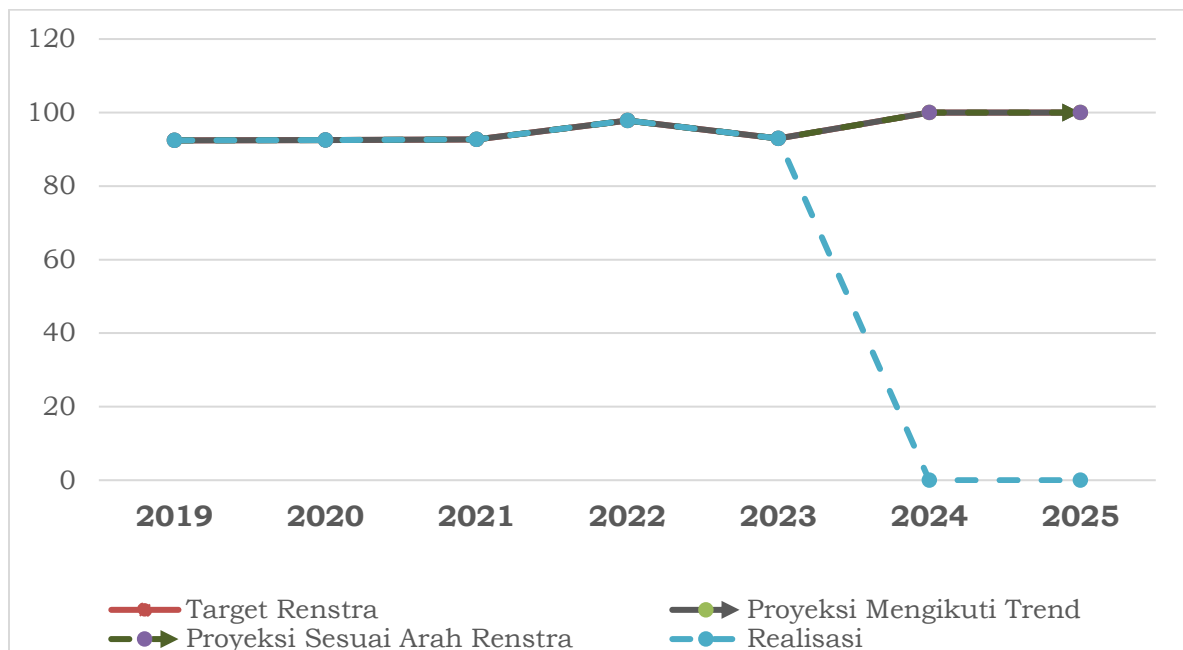
Sumber : Bidang Humas dan Komunikasi Publik, 2024

Gambar 2.2.
Cakupan Layanan Telekomunikasi



Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

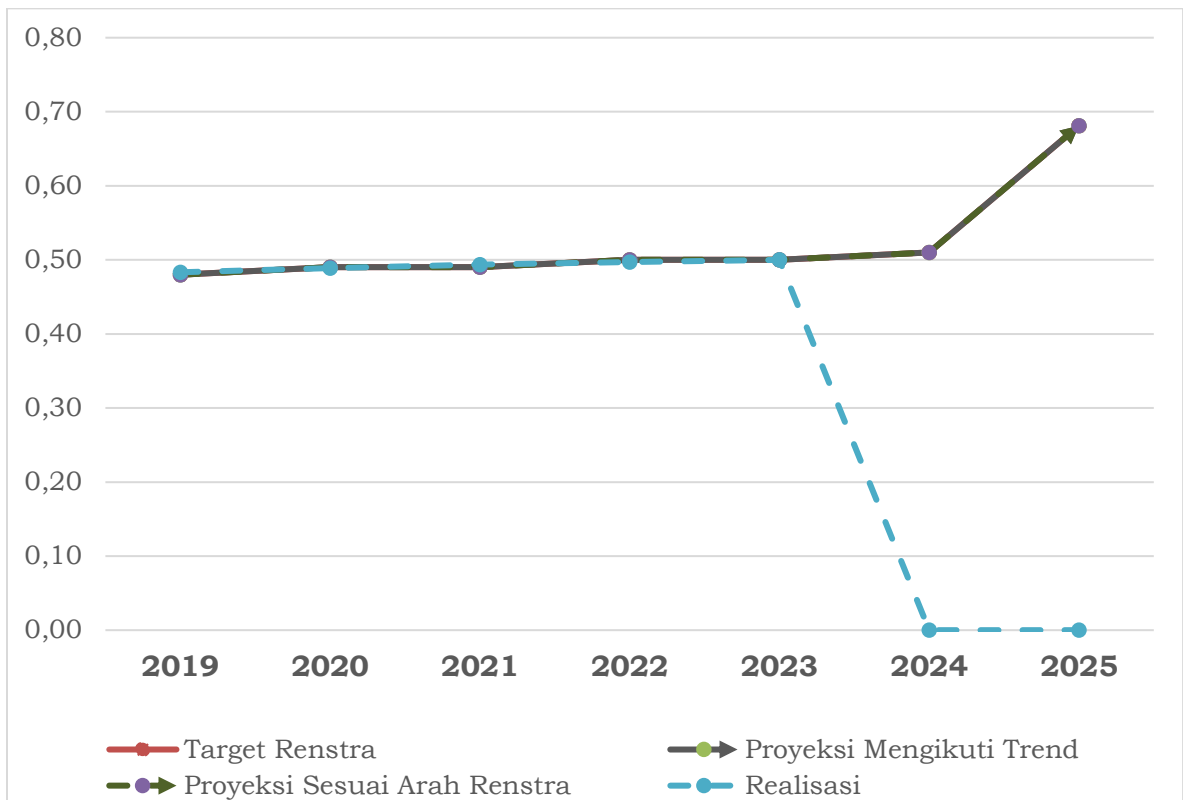
Gambar 2.3.
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon



Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

Gambar 2.4.

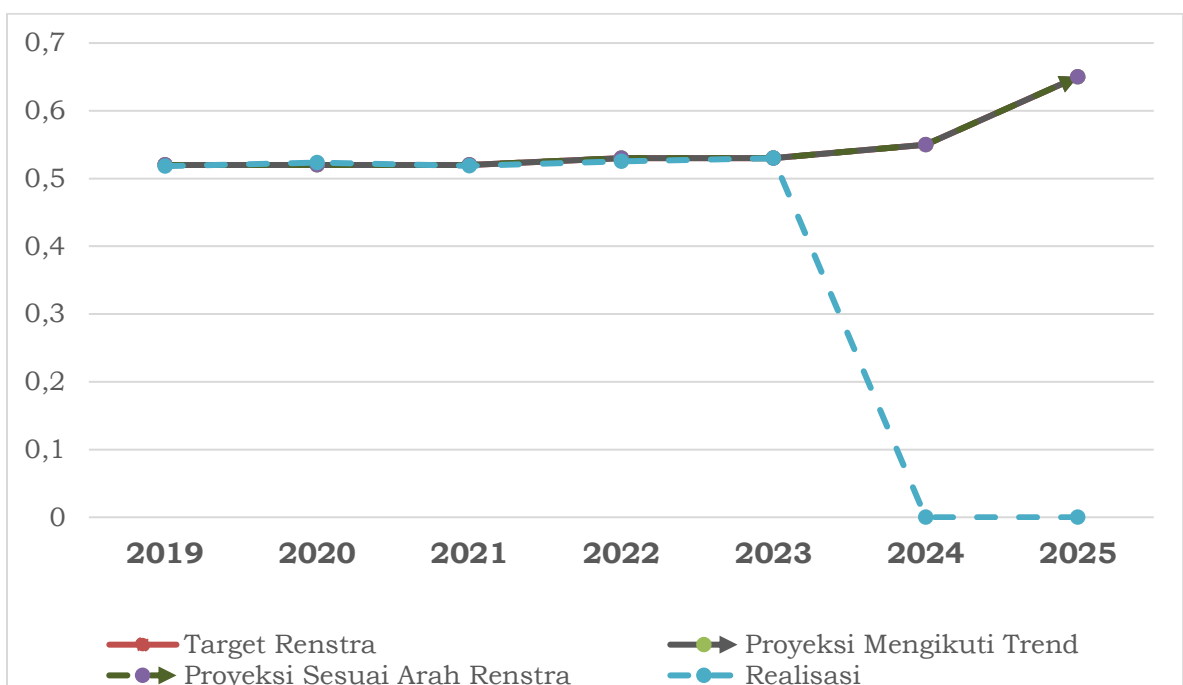
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet



Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

Gambar 2.5.

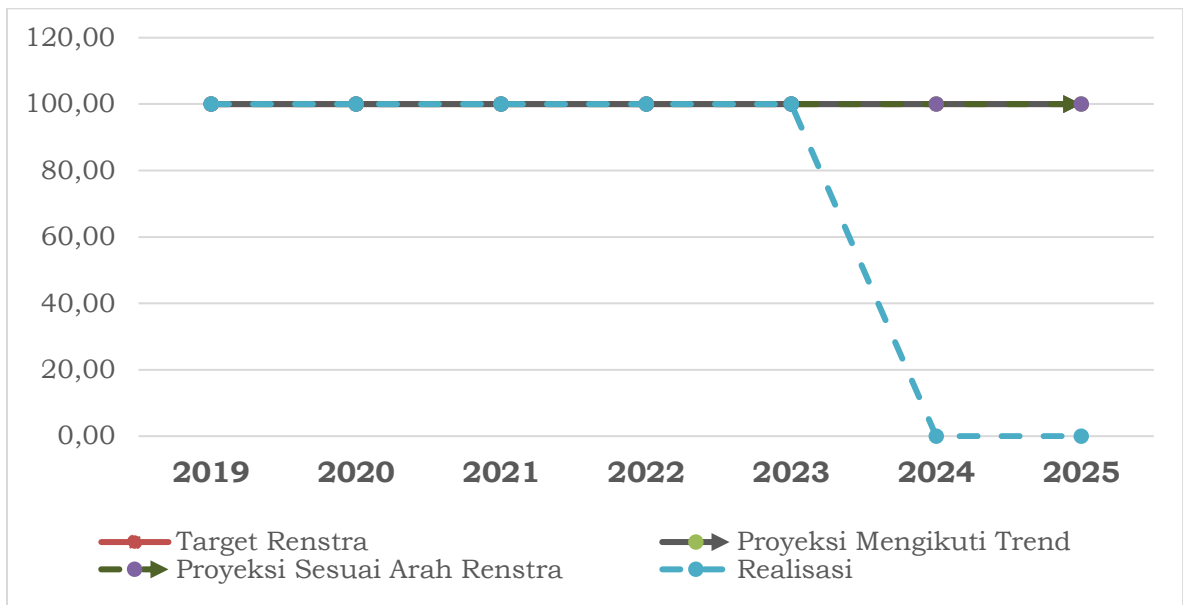
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi



Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

Gambar 2.6.

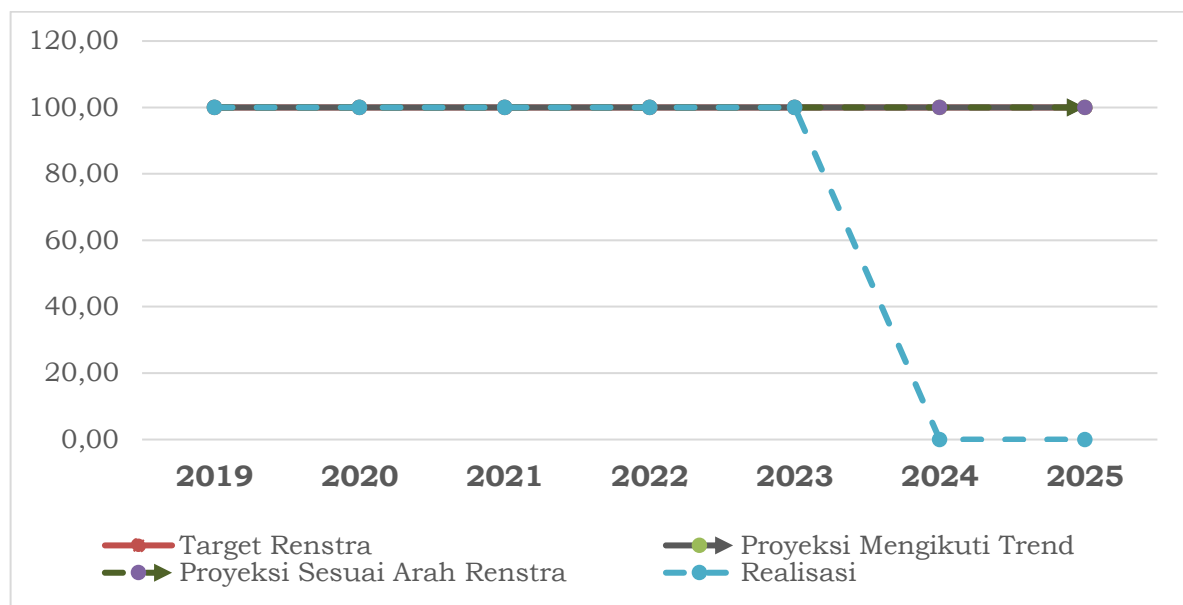
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi



Sumber : Bidang Statistik Sektoral, 2024

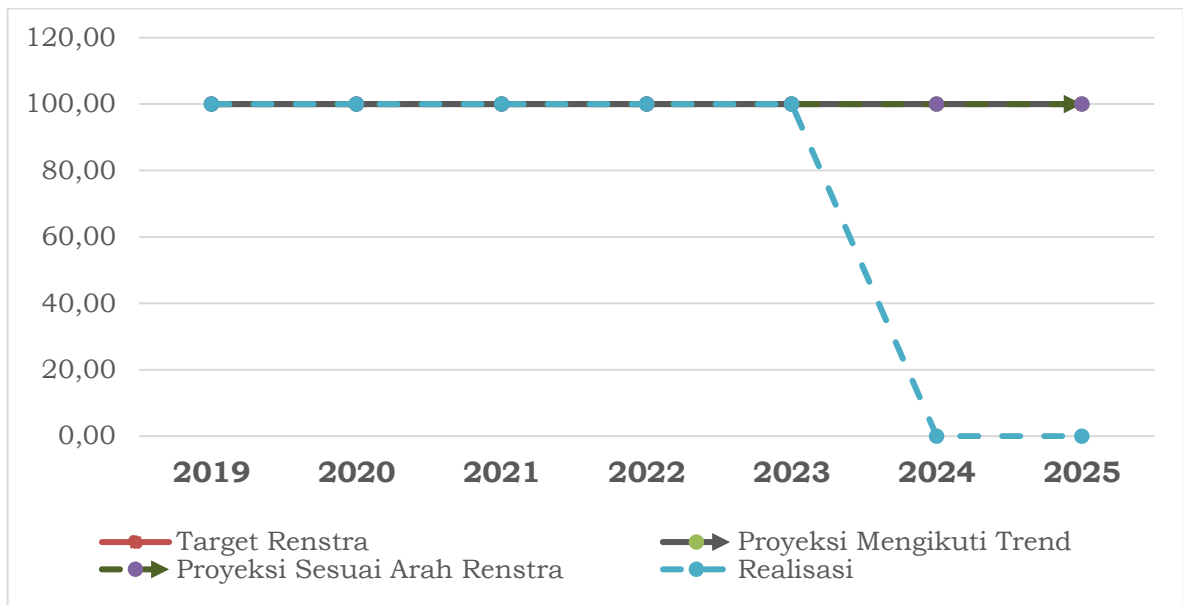
Gambar 2.7.

Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka”



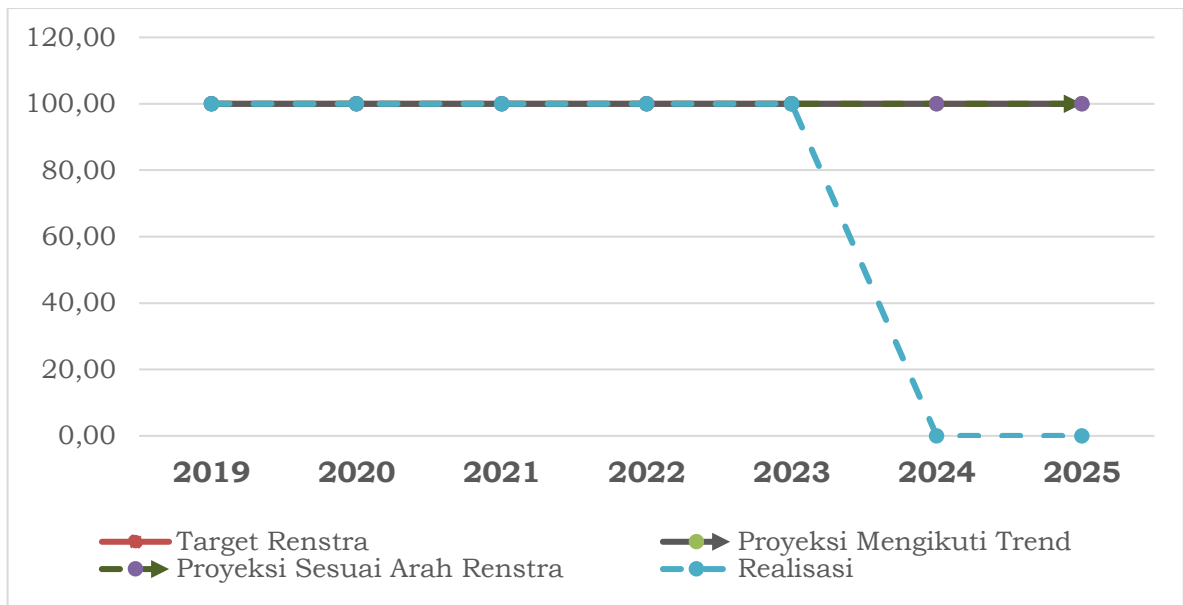
Sumber : Bidang Statistik Sektoral, 2024

Gambar 2.2.8.
Tersedianya Buku “PDRB”



Sumber : Bidang Statistik Sektoral, 2024

Gambar 2.2.9.
**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi
dalam Komunikasi Perangkat Daerah**



Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dan struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, kondisi umum capaian kinerja layanan yang dapat dicapai selama 2 (dua) tahun terakhir dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian Tahun Ke		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan layanan Telekomunikasi	-	-	0,75	0,80	0,80	0,81	0,79	0,79	0,80	0,80	
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	-	-	93.57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	-	0,457	0,484	0,581	0,681	0,481	0,481	0,484	0,581	
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	0,595	0,738	0,650	0,700	0,595	0,595	0,738	0,650	
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Buku "PDRB"	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
9	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

2.2.3. Pengolahan Data Informasi

Pengolahan data dan informasi guna pengusulan program dan kegiatan memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berasal dari setiap bidang yang mempunyai kewenangan terkait komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Data dan informasi dimaksud akan menjelaskan setiap capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang menjadi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana

dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang disajikan sebagai berikut.

1. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1.1. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada bidang komunikasi dan informatika, menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Humas dan Komunikasi Publik, dan Bidang Informatika dan Persandian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, yang terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

1.1.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat kecamatan di Kabupaten Wajo sejak tahun 2019 – 2023, mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 14 (empat belas) KIM yang telah dilakukan pengembangan kompetensinya menjadi sebanyak 50 (lima puluh) KIM di tahun 2023 melalui sosialisasi yang diharapkan setiap pemerintah desa/kelurahan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan KIM di wilayahnya masing-masing. Pengembangan kompetensi KIM dilakukan pada KIM desa/kelurahan dengan maksud meningkatkan kolaborasi kemitraan pemerintah dan sebagai bagian dari sistem informasi nasional dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi dan diseminasi informasi secara luas. Mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa.

Untuk lebih jelasnya mengenai Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat kecamatan di Kabupaten Wajo tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.1.

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	14	25	50	50	50
2	Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten/Kota	14	14	14	14	14
Cakupan Layanan Telekomunikasi		100,00	178,57	357,14	357,14	357,14

Sumber : Bidang Humas dan Komunikasi Publik, 2024

1.1.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Layanan telekomunikasi di Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dinilai belum optimal, mengingat masih terdapat sejumlah area yang mengalami *blankspot* yang disebabkan belum tercoverage jaringan teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan internet, dimana terdapat keluasan wilayahnya 1.879,05 Km²

atau (75%) dari wilayah Kabupaten Wajo seluas 2.506,19 Km². Ketersediaan penyedia menara telekomunikasi yang mendirikan menara telekomunikasi sebanyak 11 penyedia yang membangun 142 buah menara telekomunikasi. Selain adanya wilayah blankspot, terdapat juga beberapa wilayah yang signal telekomunikasi masih 3G maupun 2G.

Untuk lebih jelasnya mengenai cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.2.

Cakupan Layanan Telekomunikasi

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Wilayah yang Tercoverage	1.879,05	1.879,05	1.879,05	1.879,05	1.879,05
2	Luas Wilayah Keseluruhan (Km ²)	2.506,19	2.506,19	2.506,19	2.506,19	2.506,19
Cakupan Layanan Telekomunikasi		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

1.1.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Jumlah penduduk yang menggunakan HP/Telepon PSTN di Kabupaten Wajo sejak tahun 2019-2023 senantiasa meningkat khususnya yang memiliki HP, mengingat perkembangan komunikasi dan informatika dalam berkomunikasi dan kegiatan masyarakat lainnya menggunakan peralatan komunikasi yang salah satunya adalah melalui HP. Hal ini berbanding terbalik dengan kepemilikan Telepon PSTN yang mengalami penurunan disebabkan beralihnya masyarakat ke menggunakan HP yang lebih praktis dan mobile dalam kehidupan komunikasi sehari-harinya.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.3.

Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk yang memiliki HP	366.180	367.527	368.874	371.990	377.110
2	Penduduk yang memiliki Telepon PSTN	1.521	1.521	1.521	1.550	1.500
3	Jumlah Penduduk yang memiliki HP/Telepon	367.701	369.048	370.395	371.495	378.610
4	Jumlah Penduduk	397.814	398.784	399.769	399.875	405.137
Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon		92,43	92,54	92,65	92,90	93,45

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

1.1.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 senantiasa meningkat setiap tahunnya. Begitu pula dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses jaringan internet. Persentase layanan telekomunikasi yang mencapai 75% di tahun 2023 dan kepemilikan HP oleh penduduk yang tinggi sebesar 93,45% menjadi salah satu penyebab sehingga proporsi rumah tangga dengan akses internet semakin meningkat.

Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.4.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	49.149	50.675	51.775	52.775	53.660	53.788
2	Jumlah rumah tangga	103.712	104.846	105.946	106.946	107.940	108.005
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet		0,47	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

1.1.5. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Kepemilikan komputer pribadi oleh rumah tangga dalam aktivitas sehari-hari, khususnya yang berdomisili pada pusat-pusat ibukota kecamatan dan wilayah yang memiliki sekolah baik menengah pertama dan menengah atas menjadi dasar untuk mengetahui ketersediaan komputer pribadi. Para siswa dan mahasiswa serta penduduk bekerja memiliki kebutuhan terhadap komputer pribadi dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan mudah. Olehnya itu, terdapat penambahan jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.5.

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	52.512	54.347	55.456	55.456	56.700	56.800
2	Jumlah rumah tangga	103.712	104.846	105.946	106.946	107.940	108.005
Proporsi Rumah Tangga yang memiliki Komputer Pribadi		0,51	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

1.2. Bidang Statistik

Pada bidang statistik, menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Statistik Sektoral di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, yang terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

1.2.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sistem data dan statistik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dapat diakses melalui portal <https://satudata.wajokab.go.id> yang memuat berbagai data dan informasi statistik sektoral. Selain itu, terdapat juga data dan informasi yang terkait statistik sektoral termuat dalam SIPD pada menu e-walidata, kesemuanya telah terintegrasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan sistem data dan statistik di Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.6.

Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bidang Statistik Sektoral, 2024

1.2.2. Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Buku “Kabupaten Wajo Dalam Angka” setiap tahunnya yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo, juga telah dicetak oleh Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Buku dimaksud memuat berbagai data dan informasi statistik sektoral menyangkut geografi dan iklim, pemerintahan, dewan perwakilan rakyat daerah, sumber daya manusia, keuangan pemerintah, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial dan kesejahteraan rakyat, kesehatan, agama dan sosial lainnya, kemiskinan, pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, industri, pertambangan dan energi, pariwisata, transportasi dan komunikasi, perbankan, koperasi dan harga-harga, pengeluaran penduduk, perbankan, koperasi dan harga-harga, sistem neraca regional, dan perbandingan antar kabupaten.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan Buku “Kabupaten Dalam Angka” Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.7.

Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka”

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bidang Statistik Sektoral, 2024

1.2.3. Tersedianya Buku “PDRB”

Buku “PDRB Kabupaten Wajo” setiap tahunnya dirilis juga oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo dan dicetak ulang oleh Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang memuat berbagai data dan informasi berupa penjelasan umum, ruang lingkup dan metode penghitungan, dan tinjauan ekonomi Kabupaten Wajo.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan Buku “PDRB” Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.8.

Tersedianya Buku “PDRB”

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bidang Statistik Sektorial, 2024

1.3. Bidang Persandian

Pada bidang persandian, menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Bidang Informatika dan Persandian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, yang terdiri atas satu indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah, dimana pengiriman informasi melalui email sanapati dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) merupakan salah satu sistem pengamanan informasi yang sangat aman sesuai amanat Peraturan Kepala BSSN RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaringan Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi berupa email sanapati dalam menerima dan berkirim berita/radiogram.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah di Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.9.

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	53	41	41	39	39
2	Jumlah perangkat daerah	53	41	41	39	39
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian, 2024

Dalam evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.10.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)			Target Nasional	Realisasi 2023
	Tujuan	Target	Indikator		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	Indikator 5.b.1. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Tidak Ada Target	92,95
3	Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Target 9.c. meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Indikator 9.c.1. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Tidak Ada Target	0,78
			Indikator 9.c.1. (a). Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Tidak Ada Target	92,95
			Indikator 9.c.1. (b). Proporsi individu yang menggunakan internet	Tidak Ada Target	0,50
4	Tujuan 16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan	Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	Indikator 16.10.2.(a). Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Ada Target	Tersedia (39 Badan Publik)



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)			Target Nasional	Realisasi 2023
	Tujuan	Target	Indikator		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Inklusif di Semua Tingkatan		Indikator 16.10.2.(b). Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Tidak Ada Target	0%
			Indikator 16.10.2.(c). Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Tidak Ada Target	0%
5	Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Target 17.6. Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui	Indikator 17.6.2.(b). Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan	Tidak Ada Target	0,78
			Indikator 17.6.2.(c). Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Tidak Ada Target	0,78

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)			Target Nasional	Realisasi 2023
	Tujuan	Target	Indikator		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global			
		Target 17.8. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	Indikator 17.8.1. Proporsi individu yang menggunakan internet	Tidak Ada Target	92,95

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun sebelumnya, serta

capaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Berikut disajikan 6 (enam) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang dapat dilihat pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 terkait isu-isu strategis dan disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah, sebagaimana rincian berikut ini.

1. Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik serta keamanan informasi publik.
2. Konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi di setiap wilayah.
3. Peningkatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik secara masif.
4. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
5. Pembangunan *smartcity*.
6. Pembangunan satu data statistik.

Tabel 2.3.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah**

Aspek Capaian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD	
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
10.	Komunikasi dan Informatika					
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	Tidak Ada	Belum optimalnya budaya bermedia digital, aman, bermedia digital, etis bermedia digital dan cakap bermedia digital Belum optimalnya penyampaian informasi secara terbuka Belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat	Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat	Belum optimalnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik
10.2.	Cakupan layanan telekomunikasi	79%	Tidak Ada	Meningkatnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digitasi dan terintegrasi	Adanya kebijakan tentang Infrastruktur SPBE	Belum tercipta pembangunan dan pengembangan transformasi digital
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP / Telepon	100%	Tidak Ada	Tingginya tuntutan terhadap jaringan infrastruktur teknologi		

Aspek Capaian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD	
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			informasi dan komunikasi			
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,481	Tidak Ada	Belum terintegrasinya aplikasi dan pusat data center		
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,595	Tidak Ada			
14	Statistik					
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Tidak Ada	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan portal data statistik sektoral	Adanya kebijakan satu data Indonesia	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel
14.2.	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Tidak Ada	Rendahnya kompetensi aparatur statistik	Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik	
14.3.	Buku "PDRB"	Ada	Tidak Ada	Belum optimalnya peran produsen data	Adanya penilaian Indeks Pembangunan Statistik	
15	Persandian					
15.1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	Tidak Ada	Tinggi risiko kerawanan keamanan informasi	Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional sandiman	Belum optimalnya pengamanan informasi
				Belum terbentuk CSIRT	Adanya kebijakan pengamanan data dan informasi oleh BSSN	
				Belum optimalnya perlindungan data pribadi		

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

Tabel 2.4.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tujuan 2 RPD : Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel				
No	Sasaran RPD, Indikator Sasaran RPD dan Program RPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 4 RPD		Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel		
Indikator Sasaran 4 RPD		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		

Tujuan 2 RPD : Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel				
No	Sasaran RPD, Indikator Sasaran RPD dan Program RPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Belum tercipta pembangunan dan pengembangan transformasi digital	1 Terbatasnya kompetensi aparatur berbasis TIK	1 Adanya kebijakan tentang Infrastruktur SPBE
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	2 Belum optimalnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	2 Luasnya wilayah pelayanan komunikasi dan informatika	2 Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Belum optimalnya pengamanan informasi	1 Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional sandiman	1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional sandiman
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	1 Belum optimalnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional statistisi	1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional statistisi
			2 Belum optimalnya forum satu data	2 Adanya kebijakan tentang satu data Kabupaten Wajo
			3 Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data	3 Adanya portal satu data Kabupaten Wajo
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1 Adanya pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun
			2 Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pelaporan	2 Adanya evaluasi perencanaan dan pelaporan

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dan tingkat capaiannya. Reviu dimaksud meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kebutuhan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 telah sesuai dan selaras dengan rancangan awal RKPD. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
x					2.770.123.783	Non Urusan				2.770.123.783						
x	xx	01			2.770.123.783	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan (%)	97,78%	2.770.123.783	Rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan (%)	97,78%	2.770.123.783			
x	xx	01	2.01		12.375.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100%	12.375.000	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100%	12.375.000			
x	xx	01	2.01	01	2.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	1 Dokumen	2.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	1 Dokumen	2.200.000	
x	xx	01	2.01	02	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1.650.000	
x	xx	01	2.01	03	1.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan d okumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan d okumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1.375.000	
x	xx	01	2.01	04	1.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Dokumen	1.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Dokumen	1.375.000	





Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
			dokumen DPA-SKPD (dokumen)					dokumen DPA-SKPD (dokumen)							
x	xx	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1.375.000	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	1 Laporan	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	1 Laporan	2.200.000	
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (laporan)	1 Laporan	2.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (laporan)	1 Laporan	2.200.000	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	2.594.123.783	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	2.594.123.783	
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN (orang)	26 Orang / Bulan	2.589.723.783	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN (orang)	26 Orang / Bulan	2.589.723.783	
x	xx	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1 Laporan	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1 Laporan	2.200.000	



Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x xx 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (laporan)	1 Laporan	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (laporan)	1 Laporan	2.200.000	
x xx 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100%	2.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100%	2.200.000	
x xx 01 2.05 02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	27 Paket	1.100.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	27 Paket	1.100.000	
x xx 01 2.05 11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	4 Orang	1.100.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	4 Orang	1.100.000	
x xx 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah (%)	100%	65.175.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah (%)	100%	65.175.000	
x xx 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2 Paket	5.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2 Paket	5.500.000	



Kode					Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan peralatan rumah tangga	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	6 Paket	5.500.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	6 Paket	5.500.000	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 Paket	1.100.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 Paket	1.100.000	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	10 Dokumen	1.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	10 Dokumen	1.100.000	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20 Laporan	51.975.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20 Laporan	51.975.000	
x	xx	01	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)</i>	<i>100%</i>	<i>8.250.000</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)</i>	<i>100%</i>	<i>8.250.000</i>	
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan meubel	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah paket meubel yang disediakan (unit)	1 Unit	2.750.000	Pengadaan meubel	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah paket meubel yang disediakan (unit)	1 Unit	2.750.000	
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1 Unit	2.750.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1 Unit	2.750.000	
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1 Unit	2.750.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1 Unit	2.750.000	



Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x xx 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	60.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	60.500.000	
x xx 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 Laporan	5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 Laporan	5.500.000	
x xx 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	5.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	5.500.000	
x xx 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	5.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	5.500.000	
x xx 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	44.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	44.000.000	
x xx 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	22.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	22.000.000	
x xx 01 2.09 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1 Unit	5.500.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1 Unit	5.500.000	



Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
						atau kendaraan dinas jabatan									
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	3 Unit	5.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	3 Unit	5.500.000	
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1 Unit	5.500.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1 Unit	5.500.000	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (unit)	1 Unit	5.500.000	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (unit)	1 Unit	5.500.000	
x	xx	01	2.13		Penataan Organisasi	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen penataan organisasi (dokumen)		5.500.000	Penataan Organisasi	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen penataan organisasi (dokumen)		5.500.000	
x	xx	01	2.13	03	Peningkatan kinerja reformasi dan birokrasi	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi (dokumen)	1 Dokumen	5.500.000	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi (dokumen)	1 Dokumen	5.500.000	
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				291.500.000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				291.500.000	
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase penyebarluasan informasi (%)	80%	159.500.000	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase penyebarluasan informasi (%)	80%	159.500.000	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	80%	159.500.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	80%	159.500.000	



Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16.02.2.01.02	Monitoring opini dan aspirasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000	Monitoring opini dan aspirasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000	
2.16.02.2.01.03	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (dokumen)	1 Dokumen	55.000.000	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (dokumen)	1 Dokumen	55.000.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan informasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (dokumen)	1 Dokumen	22.000.000	Pelayanan informasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (dokumen)	1 Dokumen	22.000.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan hubungan media	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Layanan Hubungan Media (layanan)	1 Layanan	38.500.000	Layanan hubungan media	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Layanan Hubungan Media (layanan)	1 Layanan	38.500.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	35 Orang	11.000.000	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	35 Orang	11.000.000	
2.16.02.2.01.11	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi (%)	55%	132.000.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi (%)	55%	132.000.000	



Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
2	16	03	2.01		Pengelolaan nama domain, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase perangkat daerah / event / aplikasi yang menggunakan sub domain pemerintah daerah kabupaten / kota (%)	55%	110.000.000	Pengelolaan nama domain, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase perangkat daerah / event / aplikasi yang menggunakan sub domain pemerintah daerah kabupaten / kota (%)	55%	110.000.000	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (unit)	39 Unit	110.000.000	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (unit)	39 Unit	110.000.000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah (%)	55%	22.000.000	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah (%)	55%	22.000.000	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (dokumen)	1 Dokumen	5.500.000	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (dokumen)	1 Dokumen	5.500.000	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Pusat Data Pemerintahan yang Dikelola (unit)	1 Unit	5.500.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Pusat Data Pemerintahan yang Dikelola (unit)	1 Unit	5.500.000	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (unit)	1 Unit	11.000.000	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (unit)	1 Unit	11.000.000	
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				44.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				44.000.000	
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di		Cakupan ketersediaan data statistik sektoral (%)	100%	44.000.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Cakupan ketersediaan data statistik sektoral (%)	100%	44.000.000	



Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	Lingkup Daerah Kabupaten / Kota					di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota									
2	20	03	2.01		Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100%	44.000.000	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100%	44.000.000	
2	20	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (dokumen)	2 Dokumen	11.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (dokumen)	2 Dokumen	11.000.000	
2	20	03	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (orang)	39 Orang	11.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (orang)	39 Orang	11.000.000	
2	20	03	2.01	03	Membangun metadata statistik sektoral	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000	Membangun metadata statistik sektoral	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000	
2	20	03	2.01	04	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS (orang)	39 Orang	11.000.000	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS (orang)	39 Orang	11.000.000	
2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				16.500.000	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				6.500.000	
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk		Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	20,92%	16.500.000	Program Penyelenggaraan Persandian untuk		Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	20,92%	16.500.000	

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	
		Pengamanan Informasi					Pengamanan Informasi								
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	60%	11.000.000	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	60%	11.000.000	
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	1 Laporan	5.500.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	1 Laporan	5.500.000	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (laporan)	1 Laporan	5.500.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (laporan)	1 Laporan	5.500.000	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)	100%	5.500.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)	100%	5.500.000	



Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 21 02 2.02 01	Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfofik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (perangkat daerah)	39 Perangkat Daerah	5.500.000	Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfofik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (perangkat daerah)	39 Perangkat Daerah	5.500.000	
Jumlah					3.122.123.783	Jumlah					3.122.123.783

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyusunan rancangan awal Renja Tahun 2025 belum mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, begitupula dengan forum perangkat daerah sebagai wadah partisipatif masyarakat dalam memberikan usulan program dan kegiatan yang akan ditujukan pada urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Olehnya itu, sehubungan dengan “Tidak” terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Berikut ini disajikan penjelasannya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.6.

**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
di Kabupaten Wajo tahun 2025**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Ada Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Masyarakat					

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

Tabel 2.7.

**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Masyarakat
di Kabupaten Wajo tahun 2025**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Ada Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Masyarakat					

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

Selanjutnya dilakukan penggabungan usulan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8

**Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Awal Renja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025**

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Non Urusan				2.770.123.783						
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan (%)	97,78%	2.770.123.783						
1.1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)</i>	100%	12.375.000						
1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	1 Dokumen	2.200.000						
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1.650.000						
1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan d okumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1.375.000						
1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1.375.000						



No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1.375.000						
1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	1 Laporan	2.200.000						
1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (laporan)	1 Laporan	2.200.000						
1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	2.594.123.783						
1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN (orang)	26 Orang / Bulan	2.589.723.783						
1.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1 Laporan	2.200.000						
1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (laporan)	1 Laporan	2.200.000						



No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100%	2.200.000						
1.1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	27 Paket	1.100.000						
1.1.3.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	4 Orang	1.100.000						
1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah (%)	100%	65.175.000						
1.1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2 Paket	5.500.000						
1.1.4.2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	6 Paket	5.500.000						
1.1.4.3	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 Paket	1.100.000						
1.1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	10 Dokumen	1.100.000						
1.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20 Laporan	51.975.000						



No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)</i>	100%	8.250.000						
1.1.5.1	Pengadaan meubel	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah paket meubel yang disediakan (unit)	1 Unit	2.750.000						
1.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1 Unit	2.750.000						
1.1.5.3	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1 Unit	2.750.000						
1.1.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</i>	100%	60.500.000						
1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 Laporan	5.500.000						
1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	5.500.000						
1.1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	5.500.000						
1.1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	44.000.000						
1.1.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</i>	100%	22.000.000						





No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1 Unit	5.500.000						
1.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	3 Unit	5.500.000						
1.1.7.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1 Unit	5.500.000						
1.1.7.4	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (unit)	1 Unit	5.500.000						
1.1.8	<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Jumlah dokumen penataan organisasi (dokumen)</i>		5.500.000						
1.1.8.1	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (dokumen)	1 Dokumen	5.500.000						
II	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
II.1	Program Pengelolaan dan Komunikasi Publik		Persentase penyebarluasan informasi (%)	80%	159.500.000						
II.1.1	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota (%)</i>	80%	159.500.000						
II.1.1.1	Monitoring opini dan aspirasi publik	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000						



No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.1.1.2	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000						
II.1.1.3	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (dokumen)	1 Dokumen	55.000.000						
II.1.1.4	Pelayanan informasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (dokumen)	1 Dokumen	22.000.000						
II.1.1.5	Layanan hubungan media	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Layanan Hubungan Media (layanan)	1 Layanan	38.500.000						
II.1.1.6	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	35 Orang	11.000.000						
II.1.1.7	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000						
II.1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi (%)	55%	132.000.000						
II.1.1	<i>Pengelolaan nama domain, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota</i>	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	<i>Persentase perangkat daerah / event / aplikasi yang menggunakan sub domain pemerintah daerah kabupaten / kota (%)</i>	55%	110.000.000						
II.1.1.1	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Diskominfo - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (unit)	39 Unit	110.000.000						

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.1.2	<i>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Diskominfofik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah (%)</i>	55%	22.000.000						
II.1.2.1	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Diskominfofik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (dokumen)	1 Dokumen	5.500.000						
II.1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Diskominfofik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (unit)	1 Unit	5.500.000						
II.1.2.3	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Diskominfofik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (unit)	1 Unit	11.000.000						
III	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				44.000.000						
III.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		Cakupan ketersediaan data statistik sektoral (%)	100%	44.000.000						
III.1.1	<i>Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota</i>	<i>Diskominfofik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)</i>	100%	44.000.000						
III.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfofik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (dokumen)	2 Dokumen	11.000.000						



No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.1.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (orang)	39 Orang	11.000.000						
III.1.1.3	Membangun metadata statistik sektoral	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (dokumen)	1 Dokumen	11.000.000						
III.1.1.4	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS (orang)	39 Orang	11.000.000						
IV	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				16.500.000						
IV.1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	20,92%	16.500.000						
<i>IV.1.1</i>	<i>Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota</i>	<i>Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang</i>	<i>Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota (%)</i>	<i>60%</i>	<i>11.000.000</i>						
IV.1.1.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	1 Laporan	5.500.000						
IV.1.1.2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (laporan)	1 Laporan	5.500.000						



No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV.1.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)	100%	5.500.000						
IV.1.2.1	Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfotik - Jalan Rusa No. 17 Sengkang	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi (perangkat daerah)	39 Perangkat Daerah	5.500.000						
Jumlah					3.122.123.783						

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024



BAB

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab tujuan, sasaran, program dan kegiatan ini, digambarkan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 senantiasa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat berbagai kebijakan nasional yang hendak diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo. Dalam perencanaannya juga memuat tujuan dan sasaran beserta indikator yang hendak dicapai pada tahun perencanaan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan antara perencanaan nasional, perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan perencanaan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan secara komprehensif. Olehnya itu, diperlukan penelaahan terhadap arah kebijakan pembangunan secara berjenjang. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mempunyai fokus pada prioritas nasional ke-3 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, pengembangan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi dengan arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur, sedangkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa peningkatan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta pengembangan inovasi. Khusus kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo pada peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional/Provinsi/Kabupaten	Sumber	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
A	Kebijakan Nasional			
	Prioritas Nasional 3	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	Belum tersusun Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, pengembangan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi			
	Highlight Indikasi Intervensi			Kebijakan yang terkait Dinas Kominfo Kabupaten Wajo
	1. Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim			
	2. Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital			
	3. Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi			
	Arah Kebijakan : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan melalui:			
	1. Menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang dan informasi			
	2. Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah			
	3. Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat			
B	Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan			
	1. Peningkatan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta pengembangan inovasi	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026	Kebijakan yang terkait Dinas Kominfo Kabupaten Wajo	
C	Kebijakan Kabupaten Wajo			

No	Kebijakan Nasional/Provinsi/Kabupaten	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026	Kebijakan yang terkait Dinas Kominfotik Kabupaten Wajo

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 senantiasa berhubungan dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 sebagai pedomannya sehingga menjadi satu kesatuan.

Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator tujuan yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sedangkan sasaran yang ditetapkan guna mencapai tujuan yaitu:

1. Meningkatnya transformasi digital, dengan indikator sasaran yaitu persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet.
2. Meningkatnya keamanan informasi, dengan indikator sasaran yaitu indeks keamanan informasi.
3. Meningkatnya penyebarluasan informasi publik, dengan indikator sasaran yaitu indeks keterbukaan informasi.
4. Meningkatnya pembangunan statistik sektoral, dengan indikator sasaran yaitu indeks pembangunan statistik.
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, dengan indikator sasaran yaitu Nilai/kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.

**Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1			Indeks SPBE	Indeks	(2,52-2.62)



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya transformasi digital	Persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet	Persentase	100%
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	(35,82-37,82)
		Meningkatnya penyebar luasan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi	Indeks	Cukup Informatif (60,31-62,31)
		Meningkatnya pembangunan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	1,48
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai / Kategori SAKIP perangkat daerah	Nilai / Kategori	(85,76-87,76) / A

Sumber : Renstra Diskominfo Tahun 2025-2026

BAB

IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah memuat berbagai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah terhadap pengampu standar pelayanan minimal, tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 senantiasa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang memuat berbagai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun untuk diselaraskan dengan SPM sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan juga TBG/SDGs.

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengatur ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dimana pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan 6. Sosial.

Melihat pada ketentuan diatas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo melaksanakan kewenangan pada Urusan Pemerintahan Wajibn yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan/atau SPM yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya pada bidang: 1. Komunikasi dan Informatika; 2. Bidang Statistik; dan 3. Bidang Persandian.

Olehnya itu, mengingat “tidak terdapat” rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah terhadap pencapaian standar pelayanan minimal yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.**Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Terhadap Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
				Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Ada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal					

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Terhadap TPB / SDGs

Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya menyangkut urusan komunikasi dan informatika yang meliputi 2 Program, 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a). Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 1) Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2.

**Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable
Development Goals (SDGs) Tahun 2025**

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
				Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi (%)	80%	53.341.700,00
1	Tidak Ada	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota (%)</i>	80%	53.341.700,00
1	Indikator 16.10.2.(a). Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	53.341.700,00
2	Indikator 16.10.2.(b). Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi				
3	Indikator 16.10.2.(c). Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan informasi publik melalui mediasi dan/atau				



No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
				Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ajudikasi non litigasi				
2		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi (%)	55%	1.334.000.700,00
2		<i>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah (%)</i>	55%	1.334.000.700,00
1	Indikator 5.b.1. Proporsi individu yang menguasai/me miliki telepon genggam	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	39 Perangkat Daerah	1.334.000.700,00
2	Indikator 9.c.1. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband				
3	Indikator 9.c.1. (a). Proporsi individu yang menguasai/me miliki telepon genggam				
4	Indikator 9.c.1. (b). Proporsi individu yang menggunakan internet				
5	Indikator 17.6.2.(b). Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan				
6	Indikator 17.6.2.(c). Proporsi penduduk terlayani mobile broadband				
7	Indikator 17.8.1. Proporsi individu yang menggunakan internet				
Jumlah					1.387.342.400,00

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025



berpedoman pada hasil pemetaan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dalam dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terdapat sebanyak 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 6.837.254.265,00 dan pagu anggaran prakiraan maju Tahun 2026 sebesar Rp. 6.623.934.355,17, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan meliputi:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Meubel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Penataan Organisasi, dengan satu sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan satu kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan meliputi:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Relasi Media
 - b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - d. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

- f. Sub Kegiatan Penyusunan Konten
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan 2 (dua) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan meliputi:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan satu sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
 - 2) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 12 (dua belas) sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi
 - f. Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
 - j. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - k. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
 - l. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo
 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan satu kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektor terhadap Sistem Statistik Nasional
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor

- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 3 (tiga) sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan satu sub kegiatan meliputi:
 - a. Sub Kegiatan Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk lebih jelasnya mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo																			
I.1	Urusan Pemerintahan Tidak Terkait Pelayanan Dasar																			
I.1.1	2	1	0			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					2.978.403.100,00						3.388.297.572,17			
	2	1	0			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaruasan informasi (%)	80%			80%	998.800.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	80%	1.818.297.572,17	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	80%			80%	998.800.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	80%	1.818.297.572,17	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0	1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Aktivitas			12 Aktivitas	686.681.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	12 Aktivitas	139.500.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0	1	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas			20 Komunitas	21.332.100,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	20 Komunitas	30.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	1	0	2.0	1	Pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan			12 Permohonan	53.341.700,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	12 Permohonan	100.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0	1	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi	20.882.200,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Rekomendasi	40.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0	2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media			1 Media	150.376.100,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Media	20.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0	2	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1 Dokumen			1 Dokumen	66.186.900,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Dokumen	1.488.797.572,17	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi (%)	55%			55%	1.979.603.100,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	55%	1.570.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0		Pengelolaan nama domain, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah	Persentase perangkat daerah / event / aplikasi yang menggunakan sub domain pemerintah daerah kabupaten / kota	100%			100%	209.761.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	185.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		daerah kabupaten / kota														
	2.1.03.2.04	Pengelolaan Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintahan Daerah serta Nama Domain Pemerintahan Desa	1 Dokumen			1 Dokumen	209.761.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Dokumen	185.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2.1.03.2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah (%)	55%			55%	1.769.842.100,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	55%	1.385.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2.1.03.2.03	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	3 Aplikasi			3 Aplikasi	10.800.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	3 Aplikasi	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2.1.03.2.05	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan			1 Laporan	19.310.400,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Laporan	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2.1.03.2.07	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	25 Data dan Informasi			25 Data dan Informasi	30.500.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	25 Data dan Informasi	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2.1.03.2.09	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen			1 Dokumen	202.603.800,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Dokumen	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo





No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	1	0	2.0	2	Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi			2 Aplikasi	24.500.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	2 Aplikasi	200.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0	2	Penyelenggaraan Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi			2 Aplikasi	10.500.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	2 Aplikasi	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0	2	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	39 Perangkat Daerah			39 Perangkat Daerah	15.120.800,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	39 Perangkat Daerah	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0	2	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	3 Layanan			3 Layanan	17.648.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	3 Layanan	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	1	0	2.0	2	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen			1 Dokumen	11.648.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Dokumen	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	2.1.03.2.07	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	5 Inovasi			5 Inovasi	80.650.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	5 Inovasi	50.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
	2.1.03.2.09	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	7 Aplikasi			7 Aplikasi	12.560.400,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	7 Aplikasi	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
	2.1.03.2.03	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	39 Perangkat Daerah			39 Perangkat Daerah	1.334.000.700,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	39 Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
I.1.2	2.2.0	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							73.591.600,00							80.000.000,00	
	2.2.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral (%)	100%	100%	100%	100%	73.591.600,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	80.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
	2.2.03.2.01	<i>Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota</i>	<i>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)</i>	100%	100%	100%	100%	73.591.600,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	80.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
	2.2.03.2.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	39 Orang			39 Orang	17.710.400,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	39 Orang	20.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	



No	Kode	Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2 2 0 3 2.0 0 1 8	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%			100%	17.710.400,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	20.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2 2 0 3 2.0 0 1 9	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%			100%	22.810.400,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	20.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2 2 0 3 2.0 0 1 0	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 Kegiatan			5 Kegiatan	15.360.400,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	5 Kegiatan	20.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
I.1.3	2 2 1	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian						28.207.000,00							44.950.000,00	
	2 2 1 0 2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	20,92%			20,92%	28.207.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	20,92%	44.950.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2 2 1 0 2 2.0 1	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kabupaten / kota	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota (%)	60%			60%	21.036.300,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD			Diskominfotik Kab. Wajo	60%	30.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo



No	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	2	0	2	2	0	2	1			1	10.586.300,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	2	0	2	2	0	3	1			1	10.450.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1	15.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	2	0	2	2	0	2	100%	100%	100%	100%	7.170.700,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	14.950.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	2	2	0	2	2	0	1	39	39	39	39	7.170.700,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	39	14.950.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
I.1.4								Usuran Pemerintahan Bidang Non Usuran											3.110.686.783,00	
	x	x	0	x	1			97,78%			97,78%	3.757.052.565,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD			Diskominfotik Kab. Wajo	97,78%	3.110.686.783,00	Diskominfotik Kab. Wajo



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	31.400.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD			Diskominfotik Kab. Wajo	100%	16.625.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Dokumen	3.125.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Dokumen	2.250.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	xx	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Dokumen	2.250.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	xx	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Dokumen	2.250.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	xx	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Dokumen	2.250.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	x	x	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.100.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	1 Laporan	2.250.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	x	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.300.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	1 Laporan	2.250.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	xx	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	2.923.354.265,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	2.595.723.783,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	x	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	26 Orang / Bulan	26 Orang / Bulan	26 Orang / Bulan	26 Orang / Bulan	2.918.204.265,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	26 Orang / Bulan	2.589.723.783,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	x	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	1 Laporan	3.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	x	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.650.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	1 Laporan	3.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo



No	Kode						Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD															
	x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	217.924.500,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	140.413.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
	x	xx	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	2 Paket	5.700.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
	x	xx	01	2.06	02		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	3 Paket	6 Paket	7.500.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	6 Paket	5.700.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
	x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	6 Paket	12 Paket	40.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	12 Paket	27.500.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
	x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	1 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	165.424.500,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	20 Laporan	101.513.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
	x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	151.500.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	15.950.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	
	x	xx	01	2.07	05		Pengadaan meubel	Jumlah paket meubel yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	22.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	1 Unit	2.950.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	x	x	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	129.500.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	3 Unit	13.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	xx	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	306.332.800,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	281.225.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	x	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	12 Laporan	30.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	x	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	12 Laporan	5.500.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	x	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.500.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	12 Laporan	20.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	x	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	235.332.800,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	12 Laporan	225.725.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x	xx	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	119.591.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskominfotik Kab. Wajo	100%	55.050.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo





No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	x x 0 2.0 0	1 9 1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	27.000.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	1 Unit	15.500.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x x 0 2.0 0	1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	9.591.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	3 Unit	9.550.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x x 0 2.0 0	1 9 6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	33.000.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	1 Unit	20.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x x 0 2.0 1	1 9 0	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	1 Unit	10.000.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
	x x 0 2.1 3	1 3	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.950.000,00		APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	1 Dokumen	5.700.000,00	
	x x 0 2.1 3	1 3 3	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.950.000,00	Disko minfotik Kab. Wajo	APBD	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Diskomin fotik Kab. Wajo	1 Dokumen	5.700.000,00	Diskominfotik Kab. Wajo
Jumlah								6.837.254.265,00						6.623.934.355,17			

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

BAB

V

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab kinerja penyelenggaraan perang daerah ini, digambarkan mengenai indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja lainnya yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Kinerja penyelenggaraan pada rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 memuat berbagai indikator kinerja sesuai kewenangan yang dimiliki khususnya terkait bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian. Begitupula dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta indikator kinerja lainnya yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

5.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan gambaran tentang ukuran pencapaian kinerja perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya termuat dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 baik terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan indikator tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

5.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, yang memuat satu tujuan dan 5 (lima) sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1			Indeks SPBE	Indeks	(2,52-2.62)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya transformasi digital	Persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet	Persentase	100%
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	(35,82-37,82)
		Meningkatnya penyebar luasan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi	Indeks	Cukup Informatif (60,31-62,31)
		Meningkatnya pembangunan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	1,48
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai / Kategori SAKIP perangkat daerah	Nilai / Kategori	(85,76-87,76) / A

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

5.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dan Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, bahwa data dan informasi yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK), meliputi:

1. Aspek Pelayanan Umum

Urusan Wajib Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar

Bidang : 1. Komunikasi dan Informatika dengan 5 (lima) buah IKK, yaitu:

- 1.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
- 1.2. Cakupan layanan telekomunikasi;
- 1.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon;
- 1.4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet; dan
- 1.5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi.
2. Statistik dengan 3 (tiga) buah IKK, yaitu:
 - 2.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi;
 - 2.2. Buku "kabupaten dalam angka"; dan
 - 2.3. Buku "PDRB".
3. Persandian dengan 1 (satu) buah IKK, yaitu:

3.1. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan	Asumsi Capaian 2024	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
I	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
	1. Komunikasi dan Informatika		
	1.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100%
	1.2. Cakupan layanan telekomunikasi	0,79	0,8
	1.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	100%	100%
	1.4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,481	0,581
	1.5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,595	0,65
	2. Statistik		
	2.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada
	2.2. Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada
	2.3. Buku "PDRB"	Ada	Ada
	3. Persandian		
3.1. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	100%	

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal bagi OPD Pengampu SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang menyebutkan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sehubungan dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tidak termasuk dalam urusan pemerintahan wajib dimaksud, sehingga tidak terdapat penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3.

**Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah
Kabupaten Wajo**

No	Indikator SPM	Target Nasional	Asumsi Capaian 2024	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Terkait dengan SPM (bukan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar)				

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

5.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo memiliki keterkaitan pada 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4.

**Penetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025**

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)			Target Nasional	Asumsi Capaian 2024	Target 2025
	Tujuan	Target	Indikator			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	Indikator 5.b.1. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Tidak Ada Target	1,00	1,00
3	Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Target 9.c. meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Indikator 9.c.1. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Tidak Ada Target	0,79	0,80
			Indikator 9.c.1. (a). Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Tidak Ada Target	1,00	1,00
			Indikator 9.c.1. (b). Proporsi individu yang menggunakan internet	Tidak Ada Target	0,48	0,58



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)			Target Nasional	Asumsi Capaian 2024	Target 2025
	Tujuan	Target	Indikator			
4	Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	Indikator 16.10.2.(a). Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Ada Target	Tersedia (39 Badan Publik)	Tersedia (39 Badan Publik)
			Indikator 16.10.2.(b). Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Tidak Ada Target	0%	0%
			Indikator 16.10.2.(c). Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Tidak Ada Target	0%	0%
5	Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Target 17.6. Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	Indikator 17.6.2.(b). Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan	Tidak Ada Target	0,79	0,80
			Indikator 17.6.2.(c). Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Tidak Ada Target	0,79	0,80
			Target 17.8. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi	Indikator 17.8.1. Proporsi individu yang menggunakan internet	Tidak Ada Target	1,00



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)			Target Nasional	Asumsi Capaian 2024	Target 2025
	Tujuan	Target	Indikator			
		informasi dan komunikasi				

Sumber : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, 2024

BAB

VI

PENUTUP

Pada bab penutup ini, digambarkan mengenai kaidah pelaksanaan, catatan penting dan rencana tindak lanjut Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 hendaknya memperhatikan kaidah pelaksanaan yang senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan mengantisipasi perkembangan lingkungan. Dalam setiap tahapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo agar menjalin koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo guna penyempurnaannya dan wujud pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan secara transparan dan akuntabel.

6.1. Kaidah Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rancangan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026. Dokumen rancangan akhir Renja ini disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan dalam pelaksanaannya ke depan perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam menyusun Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dengan membentuk tim penyusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam memberi usulan program dan kegiatan;
2. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 berdasarkan pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 sesuai dengan tahun perencanaan yang nantinya ditetapkan;
3. Setiap pemangku kepentingan dalam Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menjadikan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 yang ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta melaporkan pengendalian dan evaluasi tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo; dan
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo melakukan koordinasi secara berkesinambungan dalam setiap tahapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo mulai dari penyampaian rancangan awal Renja, rancangan Renja, forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, rancangan akhir dan penetapan Renja baik dalam rangka verifikasi dan penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan dimaksud.

6.2. Catatan Penting

1. Dalam hal terjadi perkembangan perubahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 setelah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo sebelum ditetapkan, agar melakukan penyesuaian sesuai tahapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang sedang berjalan; dan
2. Dalam hal terjadi perkembangan berbagai hal diluar kendali Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, agar melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo.

6.3. Rencana Tindak Lanjut Renja Perangkat Daerah

1. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Bupati Wajo tentang Penetapan Pagu Anggaran Perangkat Daerah dan

- mempedomani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Wajo Tahun 2025;
2. Dalam hal proses pembahasan KUA-PPAS khususnya RKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dengan DPRD Kabupaten Wajo pada pembahasan APBD Kabupaten Wajo Tahun 2025 apabila terdapat berbagai dinamika dalam pembahasan (terjadi penambahan dan/atau pengurangan baik target maupun pagu anggaran), agar melakukan penyusunan risalah rapat DPRD, berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan menyusun penyesuaian perubahan dimaksud;
 3. RKA Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang apabila dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025;
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menyusun laporan perkembangan pelaksanaan DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 secara berkala setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo sebagai wujud pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tahunan; dan
 5. Kinerja penyelenggaraan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dan selanjutnya dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkiJP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2026.

Olehnya itu diharapkan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk bekerja sesuai kewenangan dengan perencanaan yang telah tertuang pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025, RKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 dan DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025 yang nantinya diharapkan dapat berdampak secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026.